

RELEVANSI IDENTITAS AGAMA DI TENGAH DOMINASI IDENTITAS NEGARA-BANGSA

Miftah Farid Darussalam

*Program Studi Hubungan Internasional,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
Indonesia*
miftah.farid@uin-alauddin.ac.id

Mirah Satria Alamsyah

*Public Administration, Political Science,
Shandong University,
China*
satria0809@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Article History

Received

1 March 2021

Revised

5 January 2022

Accepted

9 February 2022

Keywords:

*religion; identity;
nation-state;
constructivism.*

Kata Kunci:

*Agama; identitas;
negara-bangsa;
konstruktivisme*

Abstract

This article aims to explore the relevance between religious identity and nation-state identity in influencing the behaviour of a country. By arguing that the nation-state can be treated as an identity rather than just an actor of international relations is accepted. Following the constructivist argument in International Relations that identity can shape the intentions and behaviour of individuals or even nation-states, so that the identity of the nation-state greatly dominates the behaviour of a state. However, other identities, particularly religious identities, are still relevant in the conceptual framework of identity. This research uses qualitative methods and literature studies as data exploration methods and uses identity as a conceptual framework. The results of the exploration show that the nation-state as an actor in international relations can also be treated as an inherent identity. Nevertheless, religious identity that lies within the nation-state, although it may not always represent the nation-state but can do so on a contextual basis.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi antara identitas agama dan identitas negara-bangsa dalam memengaruhi perilaku suatu negara. Dengan mengajukan argumentasi bahwa negara-bangsa dapat diperlakukan sebagai identitas daripada hanya sebagai aktor hubungan internasional yang diterima. Mengikuti argumen konstruktivis dalam Hubungan Internasional bahwa identitas dapat membentuk niat dan perilaku individu atau bahkan negara-bangsa, sehingga identitas negara-bangsa sangat mendominasi perilaku suatu negara. Meskipun demikian, identitas lain, khususnya identitas agama, masih relevan dalam kerangka konseptual identitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur sebagai metode eksplorasi data, serta menggunakan identitas sebagai kerangka konseptual. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa negara-bangsa sebagai aktor hubungan internasional dapat diperlakukan juga sebagai sebuah identitas yang melekat. Meskipun demikian, identitas agama yang terletak di dalam negara-bangsa, mungkin tidak selalu mewakili negara-bangsa tetapi bisa melakukannya atas dasar kontekstual.

PENDAHULUAN

Perjanjian Westphalia merupakan awal mula perubahan bentuk unit politik. Perubahan bentuk unit politik disertai juga dengan perubahan identitas mereka. Huntington menyatakan bahwa manusia menggunakan politik tidak hanya untuk menuruti kepentingannya namun juga untuk mendefinisikan identitas mereka (Huntington, 2011).

Ada beberapa bentuk unit politik masyarakat yang ada sebelum sistem negara bangsa Westphalia, seperti Kerajaan, Tribal, dan Feodalisme Eropa. Sistem kerajaan merupakan unit politik dengan struktur kekuasaan tunggal. Sistem Tribal, merupakan suatu sistem kekuasaan terhadap suatu kelompok masyarakat tanpa adanya kepastian wilayah geografis. Sedangkan, sistem Feodalisme Eropa, yang memberikan kekuasaan terhadap Gereja Katolik untuk mengatur setiap kegiatan terlepas dari lokasi mereka (Krasner, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dulunya tidak menitik beratkan bergabungnya mereka dalam sebuah unit politik pada batasan wilayah tertentu. Seperti

disampaikan oleh Guntram dan Kaplan, pengertian mengenai negara telah berpindah dari pengertian sosial ke territorial (Herb & Kaplan, 2017).

Bentuk unit politik bertransformasi ke dalam sistem internasional modern yang menitikberatkan pada kekuasaan terhadap suatu wilayah (Krasner, 1996). Didorong oleh prinsip *self-determination*. Bruce Cronin menjelaskan bahwa *self-determination* berarti di dalam sistem internasional negara-bangsa, setiap negara bangsa memiliki kewajiban untuk mematuhi batas wilayah internasional, sehingga negara hanya dapat memerankan perannya di dalam batas negaranya saja (Cronin & Barkins, 1994). Bentuk unit politik negara bangsa model Westphalia yang kemudian diakui, sehingga pengidentifikasian unit-politik berdasarkan pertimbangan materil, yaitu batas territorial. Kemudian, yang ditegaskan lagi dalam struktur negara modern berdasarkan *Montevideo Convention*, yaitu negara diartikan sebagai sebuah unit politik yang terdiri dari penduduk, pemerintahan yang berdaulat,

kejelasan batas wilayah dan pengakuan negara lain.

Alasan sistem negara bangsa dapat diterima sebagai legal basis unit politik untuk berinteraksi di level internasional dengan baik dijelaskan oleh akademisi *English School*. Hedley Bull dan Adam Watson misalnya menjelaskan bahwa unit politik (negara-bangsa) membentuk *International Society*, negara-bangsa membentuk proses dialog dan menyetujui aturan umum, serta institusi untuk membangun dan menjaga hubungan antar mereka (Bull & Watson, 1984). Untuk dapat berpartisipasi di dalam *international society* tersebut, hanya sistem negara-bangsa Westphalia yang diakui.

Namun, penelitian ini tidak berbicara mengenai bagaimana negara-bangsa menjadi aktor utama dalam hubungan internasional. Sama halnya dengan Huntington, Guntram dan Kaplan, tulisan ini juga telah meyakini bahwa negara bangsa sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Linklater juga menyatakan bahwa ketiadaan bentuk unit politik selain bentuk negara-bangsa modern ini merupakan sebuah keadaan yang sangat jelas (Linklater & Andrew,

1996). Melainkan, tulisan ini berfokus pada kenyataan bahwa keadaan unit politik menganut sistem negara bangsa menciptakan identitas unit politik dari sistem tersebut, yang dalam tulisan ini, sebagai 'identitas negara-bangsa'. Dengan memperlakukan negara-bangsa sebagai sebuah identitas, tulisan ini menggunakan pendekatan konstruktivisme, bahwa identitas merupakan basis dari kepentingan, sehingga perilaku sebuah unit politik dengan identitas negara-bangsa akan sesuai dengan nilai-nilai yang tercipta dari identitas tersebut (Wendt A. , 1999, p. 10).

Melalui perlakuan demikian, juga perlu disadari bahwa sebuah unit politik tidak tersusun hanya dari satu identitas. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa di dalam diri seorang individu atau aktor terdapat banyak identitas, sehingga identitas tidak tunggal atau tetap, melainkan dipahami oleh dimensi multiplisitas dan fluiditasnya (Risse, 2010; Goff & Dunn, 2004). Identitas tidak dapat dimaknai tunggal, namun terdapat identitas lain yang berbaur di dalam unit politik atau aktor yang sama. Salah satunya ialah identitas agama. Dominasi unit politik dengan identitas

negara-bangsa, memberikan gambaran bahwa adanya identitas agama seringkali diabaikan. Terlebih lagi, perkembangan negara-bangsa seiring dengan perkembangan ide sekularisme. Melalui pendekatan konstruktivis yang mengedepankan konsep identitas sebagai landasan berperilaku individu, unit politik ataupun kelompok dari unit politik, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan mengapa identitas agama masih relevan di tengah dominannya identitas negara-bangsa dalam diskursus studi Hubungan Internasional.

KERANGKA KONSEPTUAL

Identitas dalam Hubungan Internasional

Ilmu Hubungan Internasional (HI) menempatkan negara sebagai sebuah unit politik utama dalam memahami hubungan internasional kontemporer. Pada era sebelumnya, kerajaan dimungkinkan mendapat perilaku serupa dalam HI jikalau sistem tersebut masih berlaku secara umum sebagai sistem politik dari unit politik di dunia. Demikian dengan tulisan ini, level negara dijadikan sebagai unit

analisa. Tulisan bertujuan untuk memahami perilaku negara berdasarkan identitas apa yang melekat padanya. Dengan kerangka berfikir bahwa negara-bangsa merupakan sebuah identitas unit politik, sama halnya dengan agama.

Melalui Montevideo Convention, negara mendapatkan kejelasan definisinya. Negara diartikan sebagai sebuah unit politik yang terdiri dari penduduk, pemerintahan yang berdaulat, kejelasan batas wilayah dan pengakuan negara lain. Namun, menurut Grotenhius (Grotenhuis, 2009, p. 27) definisi ini hanya merupakan deskripsi faktual terhadap angka, luas wilayah dan institusi tanpa melibatkan aspek sosial di dalamnya. Oleh karena itu, konsep bangsa disandingkan dengan konsep negara untuk menjelaskan sebuah unit politik yang dikenal sebagai negara-bangsa sekarang ini. Karena konsep bangsa mampu memberikan kejelasan identifikasi terhadap aspek sosial negara. Penjelasan Grotenhius mengindikasikan bahwasanya negara-bangsa merupakan sebuah alat identifikasi unit politik. Dengan kemampuan demikian, tulisan ini

berpendapat bahwa negara-bangsa dapat dipahami sebagai sebuah identitas unit politik.

Kemudian, literatur selanjutnya membantu kami dalam memahami identitas. Alexander Wendt menjelaskan bahwa identitas mengacu pada siapa dan apa aktor tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai generalisasi pemahaman terhadap diri sendiri ataupun orang lain (Wendt A. , 1999, p. 177). Sedangkan, Rogers Brubaker and Frederick Cooper (Brubaker, 2013) menjelaskan bahwa identitas dapat dimaknai sebagai basis dari aksi sosial dan politik; fenomena kolektif yang menjelaskan kesamaan; aspek penting yang menjelaskan individu atau kelompok '*selfhood*'; juga hasil dari aksi sosial dan politik, serta hasil dari diskursus yang saling bersaing. Richard Ned Lebow (Lebow, 2008) menjelaskan bahwasanya identitas merupakan identifikasi terhadap '*us*' dan '*others*' atau istilah yang digunakannya '*in-group*' dan '*out-group*'. Kemudian, meminjam pengertian Nietzsche, Lebow menjelaskan bahwa identitas sebagai hasil dari dialog mengenai kebenaran dan budaya yang kemudian membangun komunitas diantara

mereka (Lebow, 2008, p. 476). Kondisi ini yang kemudian ia anggap menciptakan '*in-group*' dan '*out-group*'. Tulisan-tulisan mengenai pengertian identitas ini meyakinkan kami bahwa negara-bangsa bisa dipahami sebagai sebuah identitas.

Namun, identitas negara-bangsa bukan menjadi satu-satunya fokus dalam tulisan ini. Karena dominasinya sebagai identitas tunggal unit politik untuk berkiprah di level internasional, identitas agama sering kali diabaikan. Sedangkan di dalam tulisan ini, identitas agama difahami masih memiliki pengaruh di tengah kondisi demikian. Tulisan-tulisan yang ditemukan mengenai hubungan antara identitas agama dan identitas negara bangsa menjelaskan posisi agama di dalam politik negara bangsa. Jonathan Fox (Fox, 2001) menjelaskan bahwa agama diabaikan dalam pembahasan Hubungan Internasional. Fox menambahkan bahwa pengabaian terhadap agama oleh pembuat kebijakan ataupun akademisi di dalam negara datang dari pengalaman sejarah penolakan terhadap agama karena manusia mencari penjelasan rasional terhadap perilaku manusia. Kemudian, hubungan internasional terbentuk pada

era agama sebagai penyebab perang berakhir sehingga, tidak cukup tolak ukur dalam memahami pengaruh agama di dalam politik internasional (Fox, 2001). Sedangkan Shampa Biswas (Biswas, 2010) menjelaskan terdapat fragmentasi di dunia kontemporer, negara-bangsa (internasional); sub-nasional (lokal) contohnya agama, ras, bahasa, tradisi; dan supranasional. Fragmentasi ini, menurutnya akan mengancam integritas teritorial negara-bangsa yang ada (Biswas, 2010). Sementara Moria Bar-Maoz menyampaikan bahwa studi mengenai hubungan agama-negara memang terletak pada institusionalisasi agama sebagai bagian dari identitas negara, yang dapat dipahami melalui pembentukan kebijakan (fokusnya pada kebijakan keamanan) negara (Bar-Maoz, 2018). Tulisan-tulisan tersebut menempatkan identitas agama sebagai sub dari identitas negara bangsa.

Artiikel ini mengikuti pemahaman serupa. Identitas agama masih relevan di tengah dominannya identitas negara-bangsa dikarenakan posisinya sebagai sub-identitas dari negara-bangsa. Identitas negara bangsa

tetap menjadi identitas representatif dari sebuah unit politik, sedangkan identitas agama berkontribusi terhadap perilaku sebuah negara bangsa. Artikel ini akan disusun dengan pertama menjelaskan alasan penulis memperlakukan negara-bangsa sebagai sebuah identitas. Kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan bagaimana peran identitas agama dalam menentukan perilaku negara di tengah dominasi identitas negara bangsa. Kemudian kami akan menganalisa mengapa identitas negara-bangsa lebih dominan dalam menentukan perilaku negara dibanding identitas agama.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Berangkat dari pengertian “identitas”, artikel ini kemudian mengeksplorasi posisi-posisi identitas negara-bangsa dan identitas agama dalam hubungan internasional. Analisa data dilakukan dengan mengemukakan nilai-nilai apa yang membentuk identitas negara-bangsa, juga nilai-nilai yang

membentuk identitas agama sebagai sebuah unit politik. Setelah itu, dipaparkan bagaimana menempatkan identitas agama di tengah dominasi identitas negara bangsa sebagai sebuah unit politik yang dominan dalam hubungan internasional.

PEMBAHASAN

Identitas

Pertanyaan besar yang akan dijawab ialah mengapa identitas agama masih relevan ditengah dominannya identitas negara-bangsa dalam ilmu Hubungan Internasional. Namun, penjelasan mengenai identitas, identitas negara-bangsa, dan persinggungan antara identitas agama dan identitas negara-bangsa dalam hubungan internasional akan dibahas terlebih dahulu. Identitas menjadi konsep yang menarik perhatian cendekiawan HI pada era Perang Dingin. Ketika Uni Soviet memutuskan untuk undur diri dari perang dingin, minim penjelasan rasional materil untuk menjelaskan fenomena tersebut. Karena hal tersebut, pendekatan sosiologi mulai memperkaya pembahasan HI. Identitas pun

merupakan konsep yang lahir dari perkembangan ini.

Identitas menjadi penting, karena keberadaannya mampu menunjukkan *intention* (niatan) individu, bahkan negara-bangsa. *Intention* datang dari tiga proses dalam *social act* yaitu, *signaling*, *interpreting*, dan *responding* (Wendt A. , 1992, p. 405). Sebagai gambaran, dalam sebuah proses interaksi, identitas mampu mensinyalkan informasi mengenai negara A terhadap negara B, juga menjadi bahan pertimbangan Negara B dalam menginterpretasikan identitas negara A akan menghasilkan perilaku seperti apa. Proses ini menciptakan pemahaman setiap aktor yang terlibat interaksi mengenai *intention* masing masing. Kemudian mengolahnya menjadi respons. Menerima ataupun menolak sinyal yang didapatkan atau bahkan, menginterpretasi baik dan buruk informasi mengenai identitas dan kemungkinan perilaku dari lawan interaksi. Pertimbangan ini tentunya berbeda dari pertimbangan materil seperti pada arus realis dan liberal.

Lebih lanjut Wendt menjelaskan bahwa identitas terbentuk dari struktur internal dan struktur eksternal. Struktur internal merupakan kemampuan

manusia untuk menyadari dan membentuk ide mengenai dirinya, sedangkan struktur eksternal mengacu pada hubungan sosial diluar pribadi manusia yang membantu mengembangkan ide dan meredefinisikan ide tentang diri manusia (Wendt A. , 1992, p. 405). Pengidentifikasian orang lain secara stimulan juga mendefinisikan diri sendiri (Wendt A. , 1992, p. 399). Pengidentifikasian merupakan hasil dari kemampuan *cognitive* dan *deliberative* manusia. Bruce Cronin menambahkan, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai identitas (fokusnya pada identitas sosial), tiga proses setidaknya harus dilalui. Pertama *categorization*, yakni kesadaran individu untuk mempartisi dunia menjadi unit-unit komperhensif. Kondisi ini akan memperkuat pemahaman mengenai *'self'* dan *'other'*. Kedua ialah *identification*, ketika individu mengidentifikasikan dirinya dan ia dilihat sebagai *'others'* oleh individu di kelompok sosial lain. Ketiga, *social comparison between groups*, kelompok sosial secara kolektif mengidentifikasikan konsep *'in-group'* dan *'out-group'*. Secara

sederhana ialah pengidentifikasian diri mereka sebagai sebuah kelompok berbeda dari kelompok lain (Cronin B. , 1999)

Lebih lanjut, cendekiawan beranggapan bahwa identitas individu ataupun aktor politik internasional merupakan kumpulan dari banyak identitas sosial lain yang diterima seiring dengan pertukaran makna antarsubjek (Goff & Dunn, 2004; Risse, 2010). Wendt menambahkan bahwa individu dapat diidentifikasi lebih dari satu identitas membuat pemahaman mengenai identitas menjadi lebih rumit namun lebih mudah diterima. Maja Zehfuss juga menyampaikan demikian, bahwa negara dapat memiliki banyak identitas, namun hanya identitas sosial bukan identitas korporat (Zehfuss, 2006). Tambahnya, identitas korporat sebuah negara merupakan pengidentifikasian negara berdasar atribut intrinsik yang membentuknya, serta akan cenderung stabil. Dengan demikian, unit politik terbentuk dari banyak identitas, salah satunya ialah identitas yang didorong oleh pengidentifikasian negara bangsa dan agama.

Negara-Bangsa sebagai Identitas

Memandang negara-bangsa sebagai identitas merupakan perkara yang diangkat dalam artikel ini. Negara-bangsa dalam HI diperlakukan sebagai konsep tunggal, *'taken for granted'* dan aktor utama. Atribut-atribut yaitu—pemerintah, masyarakat, batas wilayah dan pengakuan negara lain merupakan aspek-aspek mengidentifikasinya. Ketika sebuah negara-bangsa berdiri dengan kelengkapan atribut tersebut, perlindungan atribut ini diperlakukan sebagai sebuah kepentingan nasional. Artikel ini mencoba melihat dari sisi yang berbeda, aspek-aspek tersebut tidak hanya menciptakan keberadaan materil sebuah negara bangsa, namun juga menciptakan gambaran ideal bagaimana sebuah unit politik yang diidentifikasi sebagai negara bangsa harus bersikap dengan identitas yang melekat kepadanya. Pemahaman mengenai aspek-aspek pembentukan negara beralih dari level materil ke level ideasional.

Sebelum beralih ke pembahasan mengenai negara bangsa sebagai sebuah identitas, definisi negara bangsa

akan dijelaskan terlebih dahulu. Negara-bangsa sebagai basis legal perwakilan sebuah kelompok sosial politik dalam hubungan internasional lahir dari perjanjian Westphalia. Poin terpenting dari hal tersebut ialah adanya kriteria dan batasan mengenai apa yang disebut sebagai negara bangsa. Negara bangsa ialah sekelompok masyarakat yang membentuk komunitas dengan persyaratan adanya batas wilayah yang jelas, masyarakat yang berdaulat (berkelompok berdasarkan keinginan sendiri/kolektif), pemerintahan, serta diperkuat dengan pengakuan dari negara lain (Knight, 1982, p. 518). Penggolongan ini juga menciptakan *sense of belonging* terhadap negara-bangsa tempat masyarakat bernaung atau biasa dikenal sebagai nasionalisme (Knight, 1982). Knight (1982) menjelaskan bahwa perasaan ini muncul karena adanya identitas dan batasan wilayah. Ketika wilayah menjadi batasan materil dimana masyarakat berkehidupan, identitas menjadi label kelompok masyarakat tersebut. Negara-bangsa merupakan identitas/label yang ia maksud. Dia menyatakan bahwa kelompok orang bergabung pada satu level generalisasi

yaitu negara-bangsa, dikarenakan pengakuan atas dasar teritori memaksa mereka untuk berintegrasi pada sebuah prinsip politik (Knight, 1982). Perasaan ini memperkuat pengaruh identitas dalam politik negara bangsa.

Pendefinisian negara-bangsa disertai kriteria-kriteria tersebut menandakan bahwa negara-bangsa sendiri merupakan sebuah identitas. Pendefinisian tersebut berdampak pada pengkategorian mengenai '*self*' dan '*other*', seperti dijelaskan di awal. Kelompok masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara-bangsa namun tidak memiliki kriteria tersebut dianggap bukan negara-bangsa. Di dalam tulisan Ned Lebow dijelaskan sebagai konsep '*ingroup*' dan '*outgroup*' (Lebow, 2008). Contohnya adalah gerakan separatis ataupun *belligerent group*. Mereka mengklaim kepemilikan wilayah, keberadaan masyarakat yang mendukung kedaulatannya, dan pemerintahan disertai atribut kenegaraan lainnya, namun kurangnya pembuktian akan klaim tersebut disertai minimnya penguat dari kelompok masyarakat yang telah lebih dulu diakui sebagai negara-bangsa

mengakibatkan mereka tidak dapat digolongkan dalam kategori tersebut.

Memahami negara-bangsa sebagai sebuah identitas penting dalam hubungan internasional. Seperti disampaikan oleh Wendt (Wendt A. , 1999, p. 405), identitas merupakan basis dari kepentingan, basis dari *intention*, juga basis dari perilaku Unit politik negara-bangsa berperilaku sesuai dengan identitas yang melekat padanya. Dengan demikian, ketika sebuah kelompok masyarakat diidentifikasi sebagai negara-bangsa, mereka akan bertindak sesuai dengan gambaran mereka terkait negara-bangsa. Sebagai contoh, ketika Indonesia merdeka, hal yang menjadi penting untuk dilakukan ialah mencari pemimpin negara yaitu Ir. Soekarno dan wakilnya Mohammad Hatta. Dikarenakan gambaran mereka terhadap negara bangsa ialah memiliki pemimpin/pemerintahan yang sah. Gambaran-gambaran demikian, lahir dari melihat perkembangan munculnya negara-bangsa baru terdahulu. Hal ini menunjukkan, identitas sebagai negara bangsa menuntun perilaku unit politik.

Meskipun demikian, jikalau negara bangsa merupakan identitas, mengapa setiap unit politik negara-bangsa memiliki kepentingan, *intention* ataupun perilaku yang berbeda? Kembali lagi pada diskusi tentang identitas, identitas terbentuk dari pendefinisian individu atau kelompok terhadap dirinya yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar dirinya. Dalam hal ini, pengalaman kelompok masyarakat memperkaya pendefinisian mereka terhadap negara bangsa. Menerapkan apa yang disampaikan oleh Zehfuss, negara-bangsa dapat dikategorikan sebagai identitas korporat sedangkan demokrasi, komunisme, religius ataupun sekuler merupakan identitas sosial yang diadaptasi seiring dengan pengalaman hidup masyarakat. Dengan demikian kepentingan, *intention* ataupun perilaku kelompok masyarakat yang diidentifikasi sebagai negara bangsa akan berbeda. Namun, pengidentifikasian berdasarkan atribut materialnya tetap sama.

Dikatakan sebelumnya negara bangsa sebagai sebuah identitas menciptakan pengkategorian golongan yang merupakan negara-bangsa dan golongan yang bukan negara bangsa.

Pengidentifikasian tersebut penting dikarenakan kehidupan negara-bangsa menitikberatkan pada legalitas. Oleh karena itu, sebuah kelompok dapat bertindak dengan leluasa apabila sesuai dengan nilai hukum yang berlaku. Dapat dilihat dari konsep-konsep yang lahir seiring dengan negara bangsa, kedaulatan atau hak untuk menentukan nasib sendiri dan melakukan apa saja yang dilegalkan selama dalam batas kedaulatan negara-bangsa (Cronin & Barkins, 1994) ataupun legitimasi, penerimaan secara moral, atau sesuai landasan hukum terhadap pemerintah di dalam wilayah kedaulatan. Gerakan separatis tidak memiliki cukup nilai ini pada diri mereka sehingga, mendapatkan identifikasi legal sebagai negara-bangsa menjadi penting bagi mereka untuk mendapatkan hak istimewa tersebut.

Selanjutnya, dengan memahami negara bangsa sebagai sebuah identitas, dapat diketahui bahwa identitas negara bangsa merupakan identitas tunggal yang berdiri di atas identitas lain. Terkhusus identitas agama, pada era kerajaan, identitas agama mendorong unit politik untuk berinteraksi dengan unit politik lain. Di era kontemporer, identitas agama tetap ada namun

pengaruhnya tidak sebesar identitas negara-bangsa.

Identitas Agama di Tengah Identitas Negara-Bangsa

Identitas agama merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh individu ataupun unit politik. Karakteristik yang biasa melekat terhadap agama adalah supernatural. Supernatural diartikan sebagai hal ihwal yang berada di luar batas kemampuan manusia (Durkheim, 1992). Agama memiliki beberapa definisi sesuai dari sudut pandang yang diambil. Dalam buku Durkheim (Durkheim, 1992) Spancer mengatakan bahwa agama pada dasarnya berisi “keyakinan akan adanya sesuatu yang maha kekal yang berada di luar intelek”. Di sisi lain, Max Muller (Durkheim, 1992), memandang bahwa semua agama sebagai “usaha dalam memahami apa-apa yang tidak dapat dipahami dan untuk mengungkapkan apa yang tidak dapat diungkapkan, sebuah keinginan yang tidak terbatas”. Ide lain yang menjelaskan mengenai agama adalah tentang keilahian atau ketuhanan. M. Reville (Durkheim, 1992) mengatakan “Agama merupakan daya penentu kehidupan manusia,

sebuah ikatan yang menyatukan suatu hal misterius dengan pikiran sadar yang dimiliki, dan dengan hal-hal yang menimbulkan ketentraman bila terikat dengan hal tersebut (Durkheim, 1992). Identitas yang terbentuk dari agama merupakan wujud dari sikap dan keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

Menurut Mol (Mol, 1978) agama dipandang sebagai suatu hal yang sakral dan sistem yang bermakna. Sakralisasi memiliki perbedaan dengan institusionalisasi pada aspek kualitas. Sakralisasi memberikan dampak kualitas tambahan terhadap suatu institusi untuk tidak tersentuh dan menciptakan kekaguman. Kualitas menjadi bahan dasar yang kuat dalam membangun identitas (Mol, 1978). Agama mampu menjadi identitas dapat dilihat dari beberapa faktor seperti doktrin agama, teks, dan tradisi lisan. Doktrin agama yang menjelaskan keberadaan manusia merupakan suatu hal yang kuat dalam membentuk sistem kepercayaan dan memelihara identitas. Doktrin agama ini biasa berbentuk penjelasan mengenai kesamaan asal usul yang dialami. Agama seringkali memberikan penjelasan

kesinambungan tanpa batas antara masa lalu, masa kini, dan masa depan (Seul, 1999). Hal ini yang tidak mampu dilakukan oleh identitas lainnya sehingga, mampu menjadi nilai yang kuat dalam membangun identitas. Ditambah lagi dengan mekanisme sakralisasi yang dituangkan ke dalam perwujudan, komitmen, ritual, dan mitos (Mol, 1978). Teks dan tradisi lisan yang mengajarkan kepercayaan dan norma yang jelas dalam bersosialisasi memberikan bentuk stabilitas psikologis yang baik. Selain itu, hal tersebut juga meningkatkan rasa kekhasan dan tujuan kelompok yang menjadi kebutuhan, rasa memiliki, dan aktualisasi diri (Mol, 1978).

Jika dilihat dari beberapa syarat terbentuknya suatu identitas menurut Bruce Conin (1999), seperti *Categorization, Identification, and Social Comparison between Groups*, maka agama mampu menjadi sebuah identitas. Kategorisasi ditunjukkan dengan keyakinan terhadap suatu agama yang diyakini dan melihat perbedaan keyakinan dengan agama lainnya yang berbeda. Berimbang pada perilaku memprioritaskan identitas agamanya dibanding yang lainnya

(Cronin B., 1999, p. 61). Perbandingan dengan kelompok lainnya dilihat dari bentuk ritual dan komunikasi simbolik yang dilakukan. Sedangkan dalam tiga proses pengaruh sosial Kelman (kepatuhan, identifikasi, dan internalisasi), perbandingan dapat dilihat dalam proses ritual, berdoa, dan bentuk interaksi lainnya yang memberikan akses keagamaan terhadap individu untuk konstruksi dan memelihara identitas mereka (Seul, 1999).

Identitas agama bukan hal baru dalam HI. Hal ini merupakan landasan utama unit politik masyarakat sebelum negara bangsa (contoh, kekhalifahan islam; feodalisme Eropa). Pengelompokan masyarakat berdasarkan identitas agama kemudian berganti ke sistem internasional modern yang menitikberatkan pada garis territorial. Sehingga identitas masyarakat menjadi lebih heterogen. Hanya sebagian kecil dari banyak negara-bangsa saja yang homogen seperti diberitakan oleh *The Washington Post* bila negara-bangsa paling homogen ialah Jepang dan Korea Selatan. Dengan keadaan demikian, dimanakah identitas agama dapat menyesuaikan diri. Beberapa

contoh tindakan negara terhadap hubungannya dengan agama ialah privatisasi dan nasionalisasi terhadap agama. Dalam hal ini, sistem negara modern dari Barat melakukan modifikasi terhadap faktor agama dari “*community believer*” menjadi “*body beliefs*” (Mendelson, 2012).

Membahas mengenai agama dalam kerangka pemikiran identitas menjadi penting. Fenomena identitas agama yang semakin kuat sering dikaitkan dengan beberapa konflik yang terjadi di beberapa wilayah. Menurut Amartya Sen, semakin meningkatnya pengkalsifikasian masyarakat global berdasarkan pada golongan agama tertentu, maka akan membuat respon Barat terhadap tindakan terorisme dan konflik global semakin meningkat (Sen, 2016, p. 18). Terdapat beberapa kesalahan dalam memahami identitas agama yang kemudian berujung pada konflik. Salah satunya adalah memandang agama sebagai identitas yang eksklusif. Dalam sudut pandang negara bangsa, identitas sebagai negara bangsa yang bersifat heterogen mampu menjadi wadah untuk memfasilitasi beberapa identitas majemuk. Sen menambahkan bahwa

identitas akan bekerja secara prioritas menurut konteks yang dihadapinya (Sen, 2016, p. 35). Dalam, kondisi dimana negara bangsa mewadahi banyak identitas, identitas agama masih akan mampu mendefinisikan perilaku negara tergantung konteks yang dihadapi. Hal ini menjadikan agama masih relevan. Namun, di tengah identitas negara bangsa yang dominan di level internasional, identitas agama masih akan kesulitan untuk menjadi identitas dengan fungsi representatif. Perdebatan antara kedua identitas ini akan dilanjutkan di bagian berikutnya.

Relevansi Identitas Agama di Tengah Identitas Negara-Bangsa

Identitas negara bangsa dan agama saling melengkapi? Bagaimana kami memperlakukan keduanya di dalam artikel ini? Kami andaikan bahwa identitas sebuah unit politik merupakan sebuah bawang. Argumen ini datang dari Steve J. Kulich professor Shanghai, International Studies University, mengikuti model *culture as onion* yang dikembangkan oleh Gert Hofstede, yang menjelaskan bahwa individu seringkali diidentifikasi identitasnya

berdasarkan dari lapisan terluar yang terlihat oleh mata aktor lain (Geert Hofstede, 2010). Padahal, seperti sebuah bawang, setiap lapisan di dalam mungkin berbeda dengan lapisan terluar yang terlihat. Tambahnya, lapisan terluar mungkin merepresentasikan unit politik, namun tidak menjelaskan sebenarnya aktor tersebut (Geert Hofstede, 2010). Seperti dijelaskan oleh Francis Fukuyama (Fukuyama, 2018) tentang identitas, berpendapat bahwa identitas yang tidak diberi pengakuan yang cukup di dunia aturan sosial akan berperilaku berdasarkan pencarian pengakuan yang setara atas martabat mereka. Hal ini banyak terjadi pada masyarakat yang terpinggirkan, baik berdasarkan ras, jenis kelamin, agama atau lainnya. Selain itu, lapisan luar yang menggambarkan identitas sebuah komunitas belum tentu menjelaskan *'true inner self'* (Fukuyama, 2018). Cendekiawan ini menjelaskan adanya lapisan dalam identitas.

Dari apa yang disampaikan, identitas yang berada pada lapisan terluar memiliki kemampuan dominasi representatif terhadap identitas lain. Sedangkan lapisan lain di dalamnya merupakan identitas-identitas lain yang

memengaruhi perilaku sebuah negara. Dengan demikian, identitas agama terletak di lapisan dalam dan mampu berpengaruh pengaruh pada pengambilan keputusan negara-bangsa, namun tidak memiliki kemampuan untuk merepresentasikan unit politik dikarenakan tidak berada pada posisi terluar. Kondisi ini yang menunjukkan hubungan antara identitas agama dan identitas negara-bangsa. Lingkungan internasional memungkinkan identitas negara-bangsa berada pada lapisan terluar identitas unit politik. Kemudian, atribut fisik juga menunjang identitas negara-bangsa, seperti bendera, lambang, undang-undang, masyarakat, pemerintah, wilayah bahkan pengakuan, yang menunjukkan kemampuan identitas negara-bangsa untuk merepresentasikan unit politik (Geert Hofstede, 2010).

Terdapat beberapa kasus yang menjelaskan kondisi berbanding terbalik. Turki misalnya seringkali digambarkan melalui pengidentifikasian agama. Dengan kondisi negara-bangsa yang mayoritas Muslim, mereka kesulitan untuk menggabungkan diri ke dalam Uni Eropa yang lebih menganut nilai-nilai Westernisasi. Selain itu, Negara Iran

sebagai negara mayoritas muslim merrepresentasikan identitas muslim negaranya terhadap beberapa tindakan-tindakan luar negeri yang konfliktual dengan negara Barat. Indonesia, pasca terjadinya serangan terorisme pada gedung World Trade Center 11 September 2001 merepresentasikan diri sebagai Islam Moderat dalam konteks internasional untuk menjadi jembatan antara nilai demokrasi dan Islam (Andriasanti, 2014). Beberapa fenomena tersebut menunjukkan bahwa identitas yang berada di lapisan lebih dalam akan diprioritaskan pada konteks tertentu. Hal ini berlaku pada identitas agama dalam sebuah negara-bangsa. Dalam artian, identitas agama akan memberikan beberapa pengaruh terhadap identitas yang lebih besar untuk bertindak dalam konteks internasional yaitu negara- bangsa.

Namun, sekularisasi terhadap politik merupakan tantangan terbesar identitas agama dalam merepresentasikan perilaku sebuah negara-bangsa. Sekularisme merupakan suatu konsep yang menjelaskan pemisahan urusan negara dan urusan keagamaan yang dianut oleh masyarakatnya. Untuk

menghasilkan kenetralan dan kesetaraan antara agama-agama (Bilgrami, 2012). Melalui, hubungan gereja dan negara biasanya dibandingkan dengan terdapat beberapa bentuk sekularisme, yaitu “Absolute Sekularisme” (Prancis, Amerika Serikat), “Moderate Sekularisme” (Sweden dan Belanda), “Moderate Religious Pluralisme” (Inggris, Spanyol, Italia, Yunani), “Absolute Religious Pluralism” (No European Land) (O’Brein, 2016). Konsep Sekularisme ini muncul dari Eropa pada tahun 1851 setelah konflik yang terjadi antara gereja dan negara. Doktrin sekularisme berfokus pada penolakan agama dan keagamaan yang menjadi pertimbangan dalam kegiatan bernegara (Singh, 2011). Menguatnya sekularisme, akan mendeskreditkan agama.

Berdasarkan bentuk sekularisme yang disebutkan sebelumnya dapat dilihat pola hubungan identitas agama dan identitas negara bangsa. Pertama, sistem sekuler absolut, masalah agama merupakan ranah pribadi individu dan negara tidak peduli dengan itu (Amerika Serikat). Kedua, dalam suatu situasi ada beberapa gereja yang

dikontrol oleh negara, namun agama lain tetap diberikan hak untuk mengurus dan menjalankan agamanya (Britain). Ketiga, negara memberikan kebebasan dan kesetaraan dalam setiap agama, tetapi negara tidak melepas tanggung jawabnya untuk mengurus agama apapun (Belanda dan Indonesia) (Singh, 2011). Ketiga sistem ini menunjukkan secara tidak langsung hubungan antara agama dan negara bangsa berbeda sesuai dengan pengalaman masing masing unit politik. Di tengah sistem sekuler *absolute*, akan sulit bagi identitas agama masuk memengaruhi pengambilan kebijakan. Semakin tidak sekuler negara bangsa, maka akan memudahkan identitas agama berperan. Contohnya saja Indonesia akan sulit membayangkan Indonesia tanpa sila Ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu identitas agama di Indonesia mendasari perilaku Indonesia. Misalkan dalam kepedulian Indonesia dalam konflik Palestina.

Penjelasan ini berujung pada penerimaan identitas negara-bangsa sebagai representasi unit politik di level internasional. Namun, perilaku negara dapat dideterminasi oleh identitas lain,

terutama identitas agama dalam konteks tertentu.

SIMPULAN

Dalam sebuah unit politik tertinggi di hubungan internasional yaitu negara, terdapat banyak identitas yang melekat padanya. Identitas yang lebih dominan diasumsikan akan menentukan perilaku sebuah negara di level internasional. Identitas negara-bangsa memiliki peran demikian, dikarenakan penerimaan masyarakat internasional terhadap negara-bangsa sebagai bentuk unit politik tertinggi. Oleh karena itu, kepentingan negara selalu didasari pada perlindungan terhadap masyarakat, wilayah territorial, pemerintah dan pengakuan negara lain. Dengan demikian menyisihkan peran identitas agama dalam menentukan perilaku negara. Namun, identitas agama masih tetap ada di tengah kondisi demikian, ia dapat mempengaruhi politik domestik. Kadangkala merepresentasikan kebijakan internasional sebuah negara. Namun, tidak memiliki fungsi *representative* seperti halnya identitas yang dihasilkan oleh sistem negara bangsa sehingga, identitas agama

masih menjadi relevan dalam mempengaruhi tindakan negara dalam hubungan internasional saat ini pada konteks tertentu.

Masih banyak kekurangan dalam artikel ini. Terlebih dalam melihat negara-bangsa tidak hanya sebagai

sebuah sistem melainkan identitas. Juga menghubungkan secara langsung implikasi identitas terhadap politik praktis. Namun diharapkan artikel ini mampu memantik diskusi lebih dalam topik identitas, negara bangsa dan agama.

REFERENSI

- Amstrong, D. (1993). *Revolution and World Order*. New York: Oxford University Press.
- Andriasanti, L. (2014). Identitas Islam Moderat dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *GLOBAL Vol. 16 No. 1*, 84-101.
- Appiah, K. (2006). The Politics of Identity. *Daedalus 135(4)*, 15-22.
- Bar-Maoz, M. (2018). On Religion and the Politics of Security: How Religion's Involvement in Domestic Politics Affects National Securitymaking. *The Review of Faith and International Affairs 16(2)*, 36-49.
- Bellin, E. (2008). Faith in Politics, New Trends in Study of Religion and Politics. *World Politics 60(2)*, 315-347 DOI : 10.1353/wp.0.0007.
- Bemstein, M. (2005). Identity Politics. *Annual Review of Sociology* 31, 47-74 DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100054.
- Bhargava, R. (2013). Reimagining Secularism : Respect, Domination, and Principled Distance. *Economic and Political Weekly 48(80)*, 79-92 <https://www.jstor.org/stable/24479049>.
- Bilgrami, A. (2012). Secularism : Its Content and Context. *Economic and Political Weekly 47(4)*, 89-100 DOI: 10.1111/josp.12048. .
- Biswas, S. (2010). Whither the Nation-States? National and State Identity in The Face of Fragmentation and Globalization. *Global Society 16(2)*, 175-198 DOI: 10.1080/09537320220132910.
- Brubaker, R. (2013). Language, Religion, and The Politics of Difference . *Nations and Nationalism 19(1)*, 1-20 DOI:

- 10.1111/j.1469-8129.2012.00562.x.
- Bull, H., & Watson, A. (1984). *The Expansion of International Society*. New York: Oxford University Press.
- Cronin, B. (1999). *Community Under Anarchy*. New York: Columbia University Press.
- Cronin, J., & Barkins, B. (1994). The State and The Nation : Changing Norms and The Rules of Sovereignty in International Relations. *International Organization, Vol. 4, No. 1*, 107-130 DOI: 10.1017/S0020818300000837.
- Croxtan, D. (1999). The Peace of Westphalia of 1648 and The Origin of Sovereignty. *The International History Review* 21(3), 569-591 DOI: 10.1080/07075332.1999.9640869.
- Durkheim, E. (1992). *Sejarah Agama (The Elementary Forms of Religious Life)*. New York: Free Press.
- Fox, J. (2001). Religion as Overlooked Element of International Politics. *International Studies Review* 3(3), 53-73 DOI: 10.1111/1521-9488.00244.
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Geert Hofstede, F. (2010). *Cultures and Organizations*. New York: McGraw Hill.
- Goff, P. M., & Dunn, K. C. (2004). *Identity and Global Politics: Empirical and Theoretical Elaborations*. New York: Palgrave Macmillan.
- Grotenhuis, R. (2009). *Nation-Building as Necessary Effort in Fragile States*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Herb, G. H., & Kaplan, D. H. (2017). *Scaling Identities: Nationalism and Territoriality*. Maryland: Rowman and Littlefield.
- Huntington, S. P. (2011). *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster.
- Knight, D. (1982). Identity and Territory : Geographical Perspective on Nationalism and Regionalism. *Annals of Association of American Geographers* 72(4), 514-531 DOI:10.1111/j.1467-8306.1982.tb01842.x.
- Krasner, S. (1996). Compromising Westphalia. *International Security* 20(3), 115-151 DOI:10.2307/2539141.
- Kulich, S. (n.d.). *Representing Identity as an Onion*. Retrieved from www.futurelearn.com: Inter Cultural Communication: <https://www.futurelearn.com/c>

- ourses/intercultural-communication/0/steps/11054. Dikutip pada tahun 2019
- Lebow, R. (2008). Identity and International Relations. *INternational Relations* 22(4), 473-492 DOI: 10.1177/0047117808097312.
- Linklater, & Andrew. (1996). Citizenship and Sovereignty in the Post-Westphalian State. *European Journal of International Relations*, 2(1), 77-103. doi:<https://doi.org/10.1177/0047117808097312>
- Mendelson, B. (2012). God vs Westphalia : Radical Islamist Movements and The Battle for Organising The World. *Review of International Studies* 38(3), 589-613 DOI: 10.1017/S0260210511000775.
- Mol, H. (1978). The Identity Model of religion : How It Compares with Nine Other Theories of Religion and How It Might Apply to Japan. *Japanese of Religious Studies* 6(1/2), 11-38 DOI: 10.18874/jjrs.6.1-2.1979.
- Newman, J. (2012). Tragedy and "Trauerspiel" for The (Post-) Westphalia Age. *Renaissance Drama* 40, 108-197 DOI: 10.1353/rnd.2012.0012.
- O'Brein, P. (2016). *Secularism*. Europe: Temple University Press.
- Pile, M. (1993). *Place and The Politics of Identity*. New York: Routledge.
- Risse, T. (2010). *A Community of Europeans?: Transnasional Identities and Public Spheres*. New York: Cornell University.
- Sen, A. (2016). *Kekerasan dan Identitas*. Jakarta Selatan: Marjin Kiri.
- Seul, J. (1999). "Ours Is The Way of God" : Religion, Identity, and Intergroup Conflict. *Journal of Peace Research* 36(5), 553-569 DOI: 10.1177/0022343399036005004.
- Singh, R. (2011). Secularism In India : Challenges and Its Future. *The Indian Journal of Political Science* 72(2), 501-509 <https://www.jstor.org/stable/42761435>.
- Veer, P. (1999). *Zones of Religion*. New York: Routledge.
- Veer, P. (2015). Nation, Politics, Religion. *Journal of Religious and Political Practice* 1(1), 7-21 DOI : 10.1080/20566093.2015.1047696.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It : The Social Construction of Power Politics. *International Organization* 46(2), 391-425.

- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Zehfuss, M. (2006). Constructivism and Identity : A Dangerous Liason. In S.Guzzini, & A.Leander, *Constructivism and International Relations : Alexander Wendt and His Critics* (pp. 92-116 DOI: 10.1177/135406610100700300 2).